

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat nilai IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Batu Bara pada minggu ke-2 (dua) bulan Maret 2024, dengan komoditas Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, terkait cabai merah yang merupak komoditas penyumbang harga tertinggi disebabkan di Kabupaten Batu Bara belum memasuki masa panen yang diperkirakan masa panen terjadi di pertengahan bulan April 2024 dengan luas tanam 635 ha, sedangkan untuk daging ayam ras dan bawang merah memang kabupaten batu bara bukan produsennya, tetapi pada tahun ini ada anggaran APBD untuk bantuan ayam ternak bagi peternak, sedangkan bawang merah saat ini luasannya masih sekitar 15 ha,

Sedangkan untuk komoditas beras terjadi kenaikan padahal kabupaten batu bara merupakan salah satu produsen beras itu terjadi sebab tinggi harga gabah, TPID kabupaten Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan perindag telah melakukan MOU dengan Bulog Cabang Kisaran dan telah melakukan upaya pasar murah dan gerakan pangan murah. adapun fluktuasi IPH di kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut

KETERANGAN		NILAI IPH	KOMIDATAS PENYUMBANG TERTINGGI
Januari 2024	Minggu I	0.84	Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Daging Sapi
	Minggu II	0.01	Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Daging Sapi
	Minggu III	0.19	Cabai merah,minyak goreng, jeruk
	Minggu IV	0.19	Cabai merah,minyak goreng, jeruk
Februari 2024	Minggu I	0.23	Cabai merah, beras, minyak goreng
	Minggu II	0.13	Cabai merah, beras, minyak goreng
	Minggu III	0.82	Cabai Merah, Beras, Daging Ayam Ras
	Minggu III	2.01	Cabai Merah, Beras, Daging Ayam Ras
Maret 2024	Minggu I	2.44	Cabai Merah,Daging Ayam Ras, Bawang Merah
	Minggu II	3.54	Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah
	Minggu III	2.21	Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah
	Minggu IV	1.48	Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Bawang Merah

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Batu Bara berusaha melakukan monitoring dan pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Dimana peran dan fungsi TPID Kabupaten Batu Bara guna mengendalikan harga pasar untuk memastikan bahwa harga tetap stabil dan tersedia untuk semua orang. Ini juga membantu mencegah inflasi dan deflasi, yang dapat menyebabkan masalah ekonomi yang lebih luas, pada periode tw1 di Kabupaten Batu Bara komoditas

penyumbang IPH adalah cabai merah, beras,daging ayam ras serta bawang merah,berikut data ketersediaan bahan pokok gambarnya dapat dilihat pada laporan yang telah dikirim.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Kabupaten Batu Bara sejalan dengan roadmap TPID Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	Peningkatan Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok, melalui				Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Diskominfo, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas KUKM, Dinas Kesehatan PP dan KB, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Setda, BI, Bulog
		Operasi Pasar/ Pasar Murah	Terlaksananya pasar murah/ operasi pasar pada HBKN ataupun saat terjadi lonjakan harga bahan pokok			
		Sidak pasar, monitoring harga dan pasokan	Terlaksananya sidak pasar, monitoring harga dan pasokan pada HBKN ataupun saat terjadi lonjakan harga bahan pokok			
		Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian, melalui				
	Mengelola Permintaan	Gerakan Gemar Makan Ikan	Terlaksananya kegiatan edukasi kepada masyarakat, pembagian paket ikan segar / ikan mentah dan olahan ikan kepada balita, anak stunting dan ibu hamil di 3 desa lokus stunting			Dinas Perikanan dan Peternakan, Diskominfo
		Diversifikasi Pangan	Terlaksananya lomba tingkat Kabupaten, pelatihan diversifikasi pangan			
Ketersediaan Pasokan	program Produksi Domestik	Pengembangan Sentra Produksi untuk Komoditas, Perioritas (yang mengarah kepada penggunaan teknologi dan IOT)			Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Diskominfo, Dinas PUPR, Dishub, Dinas Ketenagakerjaan, Perindag, Dinas KUKM, Setda, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, BI	
		Tanaman Pangan : Padi	Terlaksananya target LTT			
		Hortikultura : Cabai Merah, Bawang merah	Pengembangan Kampung Holtikultura			
		Peternakan : Sapi, Kambing / domba				
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Perikanan Tangkap dan Budidaya				
		Perkebunan : Sawit	Terlaksanya peremajaan sawit seluas -+ 2000 Ha			
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	Pengelolaan lumbung pangan daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Daerah yang Baik			Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bulog
		Penguatan / Perluasan Kejasama Antar Daerah (KAD)	Terlaksananya minimal 1 MoU / PKS			

Kelancaran Distribusi	Peningkatan Infrastruktur Perdagangan	Pembinaan / Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pasar yang Baik	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Dishub, Satpol PP
		Penguatan UMKM yang mengarah pada implementasi, digitalisasi, UMKM	Terlaksananya Pelatihan, Sosialisasi, Pembinaan, Pendampingan UMKM	Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Diskominfo, Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas KUKM, Dinas Kesehatan, PP dan KB, DPMPTSP, Bappelitbangda, Setda, BI, Bulog
	Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	Inventarisasi dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat	Terlaksananya Inventarisasi dan Perbaikan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Dinas PUPR, Dishub
		Pengamanan distribusi bahan pokok atau strategis lainnya	Terlaksananya Pengamanan dan kelancaran distribusi bahan pokok atau strategis lainnya khususnya saat HBKN	Dishub, Satpol PP
Komunikasi Efektif	Memperbaiki kualitas data	Penyediaan data, monitoring harga dan stok komoditas strategis	Tersedianya data harga dan stok komoditas strategis harian	Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
Komunikasi Efektif	Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Pelaksanaan Rapat, Koordinasi, Pengendalian Inflasi, baik dengan TPID Kabupaten, TPID Provinsi maupun TPIP	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sebanyak 4 (empat) kali setahun dengan TPID Kabupaten, 2 (dua) kali setahun dengan TPID Provinsi dan sekali setahun dengan TPIP	Setda, BI

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harga yang signifikan di Kabupaten Batu Bara akan terus dilakukan secara berkelanjutan, serta terus berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat menimbulkan inovasi yang bisa berdampak terhadap pengendalian harga dan juga peningkatan hasil bidang pertanian, bidang perikanan serta bidang peternakan sehingga diharapkan bisa menutupi kebutuhan di dalam daerah, TPID Kabupaten Batu Bara melalui OPD teknis akan melakukan kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya dengan langkah sebagai berikut :

- Akan mengeluarkan SK TPID Kabupaten terbaru tahun 2024 mengingat KPPN Tanjung Balai melalui surat edaran Menteri Keuangan masuk dalam tim pengendalian inflasi.
- Akan terus melakukan pasar muarah dan pangan murah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Eilayah Kabupaten Batu Bara dengan bekerjasama Bulog Kisaran dan Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar.
- Akan melakukan pendampingan penyaluran bantuan budidaya cabai merah sebanyak 15 Ha melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera kepada 3 Kelompok Tani yaitu Kelompok Budi Sentosa Desa Gambus Laut, Kelompok Harapan Jadi Desa Perupuk, kelompok Abadi Desa Lubuk Cuik.
- Akan pendampingan penyaluran bantuan budidaya bawang merah sebanyak 3 Ha melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera kepada 2 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Jati Desa Durian Kec. Sei Balai, Kelompok Tani Benteng Jaya Desa Benteng Jaya Kec. Sei Balai.

Akan melakukan pembinaan/sosialisasi dengan PKK Kabupaten Batu Bara dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran.

- Akan merealisasikan anggaran untuk bantuan ternak ayam demi bisa memenuhi kebutuhan daging ayam ras di Kabupaten Batu Bara sebesar 110.565.000 (APBD).
- Akan merealisasikan anggaran untuk Pengadaan Perahu/kapal penangkapan ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan, dan sarana keselamatan pelayaran guna peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 500.000.000 (APBD).
- Serta merealisasikan anggaran Kabupaten Batu Bara baik untuk alat pertanian, peternakan dan yang mendukung terciptanya peningkatan produkdi baik petani maupun nelayan serta peternak.
- Serta mendorong percepatan Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) saat progres pekerjaan fisik dan alat mesin sudah mencapai 94,14 % dengan sisa pekerjaan 3,86 % yaitu commisioning alat dan mesin, dan diharapkan pada tahun ini Rumah Produksi bersama sudah beroperasi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara sudah membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk pembuatan pasta cabai, dengan penggunaan teknologi dimaksud dapat meningkatkan umur simpan cabai dan nilai tambah sekaligus akan memberikan kepastian harga kepada petani dan meningkatkan pendapatan petani cabai merah di Kabupaten Batu Bara, dengan hadirnya Rumah Produksi Bersama Komoditas Cabai di Kabupten Batu Bara merupakan salah satu yang diharapkan dapat menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi.

Terus akan mengikuti rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara guna menyelaraskan kegiatan dalam pengendlaian inflasi, terkhususnya pelaksanaan rapat koordinasi atau HLM di Kabupaten Batu Bara juga akan direalisasikan, kegiatan tersebut ditargetkan dilaksanakan di periode triwulan II.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Mengingat penting pengendalian inflasi maupun IPH diharapkan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh TPIN agar ada nomor rekening anggaran terkait inflasi khususnya bagi sekteratit TPID sebab pada saat penyusunan anggaran demi menunjang langkah kebijakan yang akan diambil tidak lepas dari anggaran yang tersedia, oleh sebab itu melalui kesempatan ini diharapkan hal tersebut diatas dapat terlaksana, terkait kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada laporan yang telah dikirimkan